



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2011 – 2012
Masa Sidang	: III
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Selasa, 21 Februari 2012
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 13.30 WIB s.d 18.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara	: 1. Inventarisasi pemisahan aset pemerintah (regulator) dan BUMN bidang Transportasi (operator) berdasarkan undang-undang 2. Optimalisasi aset BUMN bidang transportasi untuk mendukung keselamatan dan keamanan transportasi serta meningkatkan kualitas pelayanan pengguna.
Ketua Rapat	: H. Muhidin M. Said, SE, MBA
Sekretaris	: Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota	: dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN, Direksi PT Angkasa Pura I-II, Direksi PT Pelindo I-IV, dan Dirut PT KAI beserta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 13.30 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN, Dirut PT Angkasa Pura I-II, Dirut PT Pelindo I-IV, dan Dirut PT KAI pada hari ini adalah inventarisasi pemisahan aset pemerintah (regulator) dan BUMN bidang Transportasi (operator) berdasarkan undang-undang; serta optimalisasi aset BUMN bidang transportasi untuk mendukung keselamatan dan keamanan transportasi serta meningkatkan kualitas pelayanan pengguna.
3. Ketua mempersilakan kepada dengan Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN serta Direksi BUMN bidang Transportasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN untuk menyelesaikan audit dan pemisahan aset (kualitatif dan kuantitatif) sesuai amanat undang-undang sesegera mungkin. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta laporan audit dan pemisahan aset disampaikan kepada Komisi V DPR RI setiap 3 (tiga) bulan.
2. Komisi V DPR RI mendorong Ditjen Perhubungan Laut untuk segera melaksanakan amanat Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran khususnya tentang pengelolaan kolam pelabuhan dan pemanduan.
3. Komisi V DPR RI mendorong Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk segera menuntaskan pembentukan *Sea and Coast Guard* dalam rangka keselamatan dan keamanan pelayaran.
4. Komisi V DPR RI mendorong Ditjen Perkeretaapian untuk melakukan pemisahan badan penyelenggara prasarana dan badan penyelenggara sarana perkeretaapian sesuai amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian sesegera mungkin. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta laporannya setiap 3 (tiga) bulan.
5. Komisi V DPR RI mendorong Ditjen Perhubungan Udara dan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk segera memperjelas status kepemilikan aset badan usaha bandar udara yang bekerjasama dengan TNI.
6. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Udara untuk segera menuntaskan terbentuknya lembaga penyelenggara navigasi penerbangan sesuai dengan amanat Undang-Undang No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan sesegera mungkin. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta laporannya setiap 3 (tiga) bulan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.00 WIB.

Jakarta, 21 Februari 2012

**DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,**

ttd

HERRY BAKTI

**DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN KEUANGAN,**

ttd

LEON MUHAMAD

KETUA RAPAT,

ttd

MUHIDIN M. SAID

**DIRJEN PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,**

ttd

TUNDJUNG INDERAWAN

**DIRJEN KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,**

ttd

HADIYANTO

**DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN LOGISTIK KEMENTERIAN BUMN,**

ttd

SUMARYANTO WIDAYATIN